

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk Allah Subhanahu Wata'ala yang paling sempurna di atas muka bumi adalah manusia, yang dengan kesempurnaan itulah manusia ditugasi sebagai 'khalifah' di bumi dan merupakan sumber daya paling potensial pada suatu negara. Seperti diungkapkan Naisbitt (1995) bahwa di tepi 'Asia Pasifik' telah memperlihatkan negara miskinpun bangkit melalui kualitas manusianya.

Potensi sumber daya manusia telah membuahkan fenomena globalisasi yang menunjukkan banyak perubahan. Di satu sisi perubahan itu berdampak positif, yaitu berupa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memberikan kemudahan kegiatan manusia. Namun pada sisi lain hal itu berdampak negatif terhadap perilaku manusia, seperti terjadinya benturan-benturan nilai kehidupan yang tidak terelakkan bahkan telah menyeret manusia pada krisis multi-dimensi diantaranya dampak 'dunia tanpa batas' - '*Borderless World*' *Power and Strategy in the Interlinked Economy* (Ohmae:1991).

Fenomena globalisasi yang kontradiktif ini membawa nuansa baru yang sulit diprediksi oleh pemikiran manusia saat ini, sehingga muncul beberapa ramalan masa depan seperti dikatakan oleh para ahli futurologi, yaitu telah datangnya masyarakat pasca-industri '*Post-industrial society*' (Bell:1980), masyarakat gelombang ketiga '*The third wave*' (Toffler:1980), Global paradoks '*Global paradox*' (Naisbitt:1995) dan situasi kesemrawutan '*Chaos*' (Briggs & Peat:1999).

Krisis multidimensi serta prediksi para ahli futurologi menyebabkan manusia sulit memposisikan dirinya bila tidak memiliki ketahanan mental, ketahanan diri dan ketahanan tatanan nilai, serta fleksibilitas diri menghadapi dampak negatif kemajuan iptek. Dampak negatif kemajuan iptek ini besar pengaruhnya terhadap perubahan sikap serta perilaku peserta didik, sehingga terjadi beberapa krisis 'erosi nilai-moral-norma' dan 'dehumanisasi', seperti krisis kepercayaan, krisis kualitas kemandirian atau krisis karakter, krisis akan nilai-nilai yang menjadi pegangan dan acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Krisis-krisis di atas merupakan dampak kemajuan iptek yang tidak diimbangi dengan imtak, yang telah lama menjadi masalah pendidikan. Berbagai kebijakan dan pembaharuan pendidikan telah dilakukan, akan tetapi dalam pelaksanaannya selalu menghadapi hambatan dan tantangan, khususnya dalam menentukan arah dan tujuan perilaku individu. Sebagaimana dikatakan Dewantara (1962:25), bahwa pendidikan itu berkuasa untuk mengalahkan dasar-dasar dari jiwa manusia, baik dalam arti melenyapkan dasar-dasar yang jahat dan memang dapat dilenyapkan, maupun dalam arti menutupi/mengurangi tabiat-tabiat jahat yang biologis atau yang tidak dapat dilenyapkan sama sekali karena sudah bersatu dengan jiwa.

Pendidikan merupakan subsistem kebudayaan yang memiliki peran strategis dalam mendayagunakan potensi manusia agar menjadi lebih baik, matang, mantap, utuh dan produktif. Pendidikan bukan hanya dipersiapkan untuk pengembangan potensi diri manusia melainkan juga mengantisipasi dampak buruk dari kecenderungan perkembangan kebudayaan manusia.

Konsep pendidikan yang ditawarkan oleh UNESCO (Delors:1997) menekankan pada pentingnya empat pilar yang harus dilakukan dalam semua proses pendidikan, yaitu: belajar untuk mengetahui (*learning to know*); belajar untuk berbuat (*learning to do*); belajar untuk hidup mandiri (*learning to be*); dan belajar untuk hidup bersama (*learning to live together in harmony*). Masyarakat Indonesia perlu ditambahkan dengan konsep 'belajar untuk berperilaku bermoral' (*learning to be morally*) atau berbudi pekerti. Sebagaimana dikatakan Dewantara (1962:25), bahwa: "... orang yang telah mempunyai kecerdasan, budi pekerti itu senantiasa memikir-mikirkan dan merasa-rasakan serta selalu memakai ukuran, timbangan dan dasar-dasar yang pasti dan tetap".

Budi pekerti seyogyanya bersatu raga dengan keempat pilar proses pendidikan tersebut, Dewantara (1962:25) berpendapat bahwa:

"...dengan adanya budi pekerti dalam watak dan karakter manusia Indonesia, itulah bersatunya gerak fikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan, yang kemudian menimbulkan tenaga, karena setiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka yang berpribadi, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri (mandiri)".

Konsep inilah yang disebut manusia yang beradab seperti yang dimaksudkan dalam tujuan utama pendidikan nasional. Manusia beradab atau disebut juga sebagai "makhluk sosial sebagai entitas yang memiliki tingkah laku yang teratur, yang pada umumnya dapat diprediksi dan potensial dikendalikan melalui pendidikan" (Max Weber).

Manusia yang beradab, seperti yang dimaksud pula dalam Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3, yakni:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan *membentuk watak* serta *peradaban* bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Berdasarkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut, maka dapat disimak bahwa setidaknya terdapat dua arah pendidikan di Indonesia, yakni: *pertama*, pendidikan untuk mengembangkan kemampuan, membentuk manusia Indonesia yang cerdas, yang memiliki pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan ini merupakan kesatuan walau dalam kenyataannya terpisah karena diarahkan untuk membangun, mengembangkan kemampuan dan keterampilan kognitif. *Kedua*, pendidikan untuk membentuk watak dan peradaban manusia, yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan diarahkan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan afektual. Dua dimensi arah pendidikan ini seyogyanya menjadi dasar bagi upaya pendidikan yang dilakukan di Indonesia dalam segala jenis, jenjang dan bentuk pendidikan.

Satu langkah untuk menterjemahkan arah pendidikan nasional tersebut diwujudkan dalam *bentuk substitusional* kebijakan pendidikan berupa pentahapan pendidikan yaitu jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang diselenggarakan pada jalur sekolah dan *bentuk kurikuler baik substansiil maupun prosedural*. Berkaitan dengan pendapat ini Taba (1962:76) berpendapat bahwa sekolah merupakan institusi dimana ilmu pengetahuan, sikap, nilai-nilai serta teknik-teknik yang diperlukan untuk dapat hidup layak di masyarakat diberikan kepada peserta didik,

sehingga diharapkan dapat melanjutkan perkembangan kebudayaan masyarakat secara bertanggungjawab.

Dalam praktek pendidikan, arah pendidikan tersebut diterjemahkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana terstruktur dan sistematis berupa kurikulum. Kurikulum sekolah pada umumnya memuat tentang materi pendidikan dan proses pembelajaran. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Pasal 1 butir 19 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003).

Kurikulum berdasarkan pasal 36 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- (a) peningkatan iman dan takwa, (b) peningkatan akhlak mulia, (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik, (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan, (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional, (f) tuntutan dunia kerja, (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, (h) agama, (i) dinamika perkembangan global, dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 penjelasan Pasal 37 ayat (1) ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk **membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.**

Materi pendidikan merupakan komponen penting dalam kurikulum, yang dimuat dalam kurikulum sekolah pada setiap mata pelajaran. Berkaitan dengan materi pendidikan, kebijakan pendidikan dalam perumusan kebijakan makro pada

kurikulum lama terdapat beberapa penyimpangan yang tidak dapat dihindari, diantaranya penyimpangan dalam pembelajaran, khususnya pada mata pelajaran PKn. Misalnya pada tahun 1962 “*civics*” tampil dalam bentuk indoktrinasi politik; tahun 1968 “*civics*” menjadi unsur dari Pendidikan Kewargaan Negara yang bermuansa pendidikan ilmu pengetahuan sosial; tahun 1969 PKN tampil dalam bentuk pengajaran konstitusi dan ketetapan MPRS; tahun 1973 PKN yang diidentikkan dengan pengajaran IPS; tahun 1975 dan 1984 PMP tampil menggantikan PKN dengan isi pembahasan P4; dan tahun 1994 PPKn tampil sebagai penggabungan bahan kajian Pendidikan Pancasila dan PKN yang tampil dalam bentuk pengajaran konsep nilai yang disaripatikan dari Pancasila dan P4. (Winataputra, 2001: 6-7).

Dalam kurikulum SD-SMP-SMA 1968, masalah berpikir kritis, kreatif, partisipasi dinamis dan *problem solving* sudah ditetapkan untuk digunakan oleh guru-guru, namun sampai saat ini metode tradisional (*unavoidable indoctrination*) ini masih tetap dilakukan. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya bahwa lembaga pendidikan belum berhasil dalam menghasilkan guru yang profesional dan mengabdikan pada fungsi perannya. Selain itu sistem sosial masyarakat yang terjadi cenderung kurang sesuai dengan tujuan negara. Sebagaimana pendapat Somantri (2001:304) bahwa beberapa faktor dipertahankannya metode tradisional, diantaranya karena: (a) ujian akhir masih bersifat hafalan; (b) buku PKN isinya banyak dipengaruhi oleh esensialisme-verbalisme; (c) (*unavoidable indoctrination*) indoktrinasi, *ground covering technique* dan yang sejenisnya adalah yang paling gampang dilaksanakan dalam KBM; (d) kurangnya kegiatan-

kegiatan penulisan ilmiah mengenai metode mengajar, sehingga penyebaran prinsip-prinsip metode yang tercantum dalam rencana pendidikan sulit untuk dijalankan.

Disimpulkan baik istilah yang dipakai, misi serta isi yang dipilih dan diorganisasikan dan strategi pembelajaran yang digunakan untuk mata pelajaran "civics" atau PKN atau PMP atau PPKn yang berkembang secara fluktuatif hampir empat dasawarsa (1962-1998) menunjukkan indikator telah terjadinya krisis konseptual serta berdampak terjadinya 'krisis operasional kurikuler'. Krisis operasional yang dalam banyak hal merupakan dampak dari krisis konseptual tercermin dalam terjadinya perubahan isi dan format buku pelajaran, penataran guru yang tidak artikulatif, dan fenomena kelas yang belum banyak bergeser dan penekanan pada proses kognitif memorisasi fakta dan konsep. (Winataputra, 2001:6-7).

Selain krisis konseptual-operasional kurikulum, disadari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang pernah ada belum berbicara secara jelas unsur proses memaknai nilai-nilai sebagai esensi pendidikan nilai di dalamnya dan disadari masih mengkaji kajian teoretis atau kognitif secara tumpang tindih dimana konsep pokok bahasan diajarkan secara berulang pada setiap tingkat/kelas, dan belum menunjukkan proses pembelajaran yang demokratis pada pembelajaran PKN itu sendiri.

Penyimpangan lain tampak dalam dunia persekolahan yang masih terasa adanya 'sesuatu yang salah' berkaitan dengan sistem sekolah, bahwa kurikulum yang dilaksanakan belum memberikan kebebasan pada guru sebagai pengembang



guru dalam kelas. Guru menurut Stenhouse (1984:24-25) adalah 'a classroom teacher - a policy maker- an educational research worker', dalam arti guru memiliki aktivitas mengajar mencakup di dalamnya aktivitas uji empirik guru secara sistematis dan bijak terhadap praktik kurikulum sebagai ide dan aktivitas pengembangan kurikulum praktis (*the real curriculum*) di kelas.

Akibat penyimpangan tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh Pusat Kurikulum (2002), bahwa gambaran potret sekolah dan Pendidikan di Indonesia masih begitu buruk, disebabkan beberapa faktor di antaranya:

- (1) Kurikulum masih berorientasi pada penguasaan materi;
- (2) Penilaian hanya sebatas pengetahuan (kognitif) tingkat rendah;
- (3) Supervisi dan pembinaan bersifat administratif;
- (4) Sekolah sebagai tempat mengajar bukan tempat belajar;
- (5) Siswa pasif, mendengar, duduk, diam, catat, hitung- tidak terjadi proses dialogis;
- (6) Guru berkuasa dan tahu segalanya;
- (7) Pengelolaan kelas kaku dan tidak bervariasi;
- (8) Ceramah tidak metode lain;
- (9) Perbedaan individu anak tidak terlayani;
- (10) Pembelajaran untuk mengejar NEM;
- (11) Sumber belajar terbatas pada buku.

Tantangan yang dihadapi oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan masyarakat adalah perlunya dilakukan sejumlah perbaikan dalam proses pendidikan, terutama pada jalur pendidikan formal (jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi) menjadi tuntutan peran dan tanggungjawab terbesar dalam proses pendidikan. Berkaitan dengan konsep tersebut Tilaar (2002:296) berpendapat bahwa upaya memperbaiki proses pendidikan melibatkan seluruh komponen pendidikan dalam suatu *Educational System*. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah mengisyaratkan bahwa yang menentukan keberhasilan pendidikan di sekolah adalah guru dan siswa. Karena itu penanganan berbagai aspek atau komponen pendidikan harus '*komprehensif*'.

Upaya memperbaiki sistem pendidikan tersebut terkait erat dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 9 bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan, dan pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Sumberdaya manusia 'Guru' merupakan ujung tombak pendidikan yang memikul peran tanggung jawab besar dalam menentukan keberhasilan pembelajaran. Berbagai upaya terus dilakukan untuk mengevaluasi langkah terbaik apa yang harus dilakukannya dalam proses kegiatan mengajar guru (KMG) dan kegiatan siswa belajar (KSB). Sebagaimana dikemukakan Tilaar (2002:296) bahwa sekalipun kemampuan profesional, status sosial dan peranan serta kesejahteraannya, juga lingkungan pekerjaannya yang dipengaruhi oleh gaya atau kultur manajemen dari para atasan guru seperti penilik dan inspektur sekolah, yang mampu mengemban tugas, akan mampu melaksanakan *motto* Ki Hajar Dewantara: *Ing ngarso sung tulodo* (di depan dapat memberikan teladan), *ing madya mbangun karso* (di tengah dapat memberi motivasi), *tut wuri handayani* (di belakang dapat mengawasi).

Guru adalah 'pekerja profesional'-*professional worker* meminjam istilah Joni (1992) yang harus senantiasa mengembangkan profesinya, melakukan *rekonstruksi, reformulasi dan revitalisasi* pembelajaran dalam rangka memenuhi



konsep pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2003 pasal 1 ayat 1 yaitu :

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai proporsi afektif, upaya *rekonstruksi, reformulasi dan revitalisasi* pendidikan oleh 'guru-pendidik' yang dilakukan secara terus menerus dalam kegiatan PBM-nya, Suyatno (2001:15) berpendapat bahwa perlu memperhatikan empat hal, yaitu :

Pertama, adalah aspek nilai-nilai kefilosofatannya. Filsafat pendidikannya (*educational philosophy*) harus dipegang betul yang membuat cita-cita luhur; *kedua* adalah nilai-nilai masukannya (*educational input*) guru harus selalu terus menerus disegarkan termasuk kurikulumnya, karena guru diibaratkan gizi atau sebuah menu; *ketiga* adalah nilai proses (*educational proses*) yang di dalamnya sarat dengan muatan-muatan interaksi edukatif dan interaksi paedagogik, guru memberi kesan dan makna yang sangat dalam; *keempat*, nilai keluarannya (*educational output*). Prototipe manusia-manusia yang ingin kita lahirkan, tipologi anak didik yang diinginkan yang memerankan *habl min Allah* dan *habl min al-nas* sesuai dengan zamannya.

Konsep pendidikan dalam era globalisasi tidak boleh terlepas dari pendidikan nilai (afektif) yang proporsional dengan aspek pengetahuan (kognitif) dan keterampilan (psikomotor). Pendidikan bukan sekedar terfokus pada alih-pengetahuan (*transfer of knowledge*), namun tak kalah pentingnya disertai signifikansi alih-sikap (*transfer of attitude*). Seiring pendapat Adimihardja (2000:1) bahwa fungsi pendidikan dimanapun di dunia ini dibangun dan dikembangkan oleh suatu negara adalah untuk meningkatkan peradaban anak bangsa, agar memiliki nilai-nilai budaya yang lebih tinggi, melalui peningkatan peradaban diharapkan manusia akan berperilaku lebih arif dalam memelihara

keseimbangan hubungan antara sesama manusia, lingkungan dimana mereka hidup dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini seyogyanya terinci dalam materi pelajaran yang diberikan pada peserta didik.

Sejak akhir dasawarsa 1970-an, para ahli pendidikan mulai secara sungguh-sungguh mengembangkan teori pendidikan yang memberikan perhatian pada aspek nilai dan sikap. Sebagaimana pendapat Adimihardja (2000:1) bahwa pendidikan seharusnya dibangun untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Kurikulum uji coba tahun 2004 adalah kurikulum yang berbasis kompetensi yang dikembangkan untuk memberikan keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakpastian, dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan. Upaya pembaharuan kurikulum ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya bangsanya serta dapat memberikan dasar-dasar pengetahuan, keterampilan, pengalaman belajar yang membangun integritas sosial serta mewujudkan karakter nasional.

Upaya ini ternyata belum memberi gambaran kemudahan pada guru dalam menyajikan pengalaman belajar yang sejalan dengan prinsip belajar sepanjang hayat yang mengacu pada empat pilar pendidikan universal yaitu belajar mengetahui, belajar melakukan, belajar menjadi diri sendiri, dan belajar hidup dalam kebersamaan.

Seiring dengan upaya ini, harapan tampilan ciri pembelajaran PKn kurikulum lama (kurikulum 1999 dan sebelumnya), yang bersifat tradisional dan

unavoidable yang memiliki indikator, yakni: (1) penguasaan/dominasi, monolog; (2) indoktrinasi, dogmatis; (3) adopsi; (4) keterpaksaan; (5) kebijakan sepihak; (6) hierakis; (7) penyeragaman; (8) mekanistik; (9) artifisial. Diharapkan dapat berubah paradigma menjadi paradigma kurikulum baru (kurikulum uji coba tahun 2004) yang memiliki sifat, yakni: (1) partisipatif, dialog; (2) stimulan; (3) inovatif, kreatif; (4) sukarela; (5) konsensus, keterbukaan; (6) kesetaraan; (7) heterogen; (8) humanis; (9) substantif.

Sebagai perbandingan dalam kurikulum 1994 dan sebelumnya terdapat *unavoidable indoctrination*, yang merupakan akibat dari perjalanan sejarah mengajar mata pelajaran PKn atau 'civics'; kurangnya perhatian oleh pemerintah sejak zaman kolonial. Namun pada kenyataannya walaupun sejak berlakunya kurikulum SD-SMP-SMA tahun 1968 dan terutama dalam pembaharuan pendidikan, masalah metode mengajar sudah mendapat perhatian tetapi dalam teknik mengajar yang disarankan sampai kurikulum 1994 masih tetap dalam status saran karena berbagai kesulitan yang timbul, sehingga berdampak para guru tetap mempraktikkan teknik mengajar yang tradisional, yaitu menekankan kepada metode ceramah, indoktrinasi, dan guru berperan sebagai *drill master*. Teknik tersebut dianggap yang paling gampang dilakukan (Somantri, 2001:303-304).

Pada masa kini dan masa depan proses pendidikan mata pelajaran PKn seyogyanya mampu membangkitkan potensi kemampuan intelektual, sikap dan keterampilan (kognitif, afektif dan psikomotor) peserta didik. Makagiansar (1990:5) berpandangan bahwa untuk menghadapi tantangan masa depan yang penuh ketidakpastian, maka proses pendidikan harus mampu setidaknya

mengembangkan kemampuan: (1) mengantisipasi, (2) mengerti dan mengatasi situasi, (3) mengakomodasi dan (4) me-reorientasi dari peserta didik.

Selain dari kemampuan tersebut, upaya melahirkan peserta didik menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab di tengah tuntutan era globalisasi, melalui internalisasi-personalisasi eksistensi mata pelajaran PKn berdasarkan Depdiknas (2003:2) merupakan salah satu mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Pola pembelajaran mata pelajaran PKn yang secara substansif menyangkut aktualisasi konsep, sistem, nilai, budaya dan praktek demokrasi serta pada akhirnya dapat membuat pemecahan berbagai persoalan hidup, berupaya agar pembelajaran PKn mencapai efektifitas yang menyangkut beberapa pemahaman sebagaimana pendapat Tilaar (2002: 241), yakni:

(1) Pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan lembaga lembaganya; (2) tentang *'rule of law'* dan Hak Asasi Manusia seperti tercermin dalam rumusan-rumusan perjanjian dan kesepakatan internasional dan lokal; (3) kekuatan keterampilan partisipatif yang akan memberdayakan peserta didik untuk merespons dan memecahkan masalah-masalah masyarakat mereka secara demokratis; (4) pengembangan budaya demokrasi dan perdamaian pada lembaga-lembaga pendidikan dan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Untuk memenuhi tuntutan pembelajaran PKn tersebut, kenyataan di lapangan masih dirasakan belum mencapai tingkat pemahaman yang berarti, diantaranya karena ditinggalkannya tatanan nilai, dalam arti guna mencapai tujuan tersebut pembelajaran PKn masih dirasakan 'kekeringan makna' kemanusiaan

'*humanisme*', serta nilai yang menyangkut hubungan antara manusia yang seyogyanya dapat terinternalisasi-personalisasi dalam perilaku-sikap peserta didik. Melalui pemahaman yang luas tentang hakikat 'nilai' kemanusiaan akan berarti pemenuhan salah satu makna kegiatan dasar manusia bagi diri peserta didik, dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Seperti dikemukakan Kluckhohn (1951) bahwa:

Asumsi kehidupan manusia dengan lima pertanyaan mendasar, yaitu: (1) Perasaan apa yang paling diutamakan manusia ketika ia menjalin hubungan dengan orang lain?; (2) Dimensi waktu apa yang ia pertingkatkan; (3) Tipe kepribadian apa yang dianggap paling bernilai?; (4) Bentuk hubungan apa yang dijalin manusia dengan alam; (5) Kecenderungan inti apa yang dimiliki manusia?

Memaknai makna nilai menjadi suatu '*urgency*' pendidikan nilai melalui internalisasi dan personalisasi 'kebermaknaan' dan nilai-nilai humanisme dalam kerangka materi pembelajaran PKn, alternatif pembinaan tatanan nilai, tatanan sikap-perilaku berbasis nilai melalui suara hati manusia (Al Ghazali)- sehingga memiliki karakteristik 'Manusia Indonesia Seutuhnya' menjadi harapan materi mata pelajaran PKn dalam proses pendidikan, sebagai implementasi perubahan kurikulum yang seyogyanya disajikan kepada peserta didik melalui proses internalisasi dan personalisasi 'kebermaknaan' nilai-nilai 'humanis' di satu sisi dan disisi lain dapat menjawab dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang masih belum mencapai sasaran. Seiring pendapat Hasan (1996; 2000:24) bahwa secara substansial, materi pendidikan akan memuat tentang pandangan, tema topik, fenomena, fakta, peristiwa, prosedur, konsep, generalisasi, dan teori. Sedangkan secara prosedural, materi pendidikan akan berkenaan dengan proses,

prosedur dan langkah yang harus dilaksanakan peserta didik dalam mempelajari materi secara substantif.

Senada dengan pendapat di atas, Surachmad (PR, 29 April 2005) menyatakan bahwa “untuk keluar dari orbit kegagalan pendidikan, para pemikir, pengambil keputusan, ilmuwan, dan pelaku pendidikan harus memperhatikan tiga aspek, pendidikan memanusiakan manusia, membudayakan manusia, dan mengindonesiakan anak bangsa”, upaya dalam kerangka proses pembelajaran PKN memuat program tersebut yakni Pendidikan Umum pada SMP yang diharapkan mampu membantu peserta didik menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang siap menghadapi tantangan era globalisasi yang cerdas, kreatif, terampil namun menjadi insan yang beriman dan berakhlak mulia.

B. Perumusan Masalah

Menghadapi tantangan dan tuntutan era globalisasi dalam konteks mempersiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi kejut masa depan ‘*Future Shock*’ (Toffler:1970) serta akselerasi perubahan dalam berbagai bidang kehidupan yang terjadi demikian cepat dan dahsyat sebagai akibat dari revolusi teknologi, namun manusia dan kehidupannya harus tetap sarat/padat norma-nilai dan moral karena tidak ada satu kehidupan-pun yang bebas nilai walaupun berada di tengah gelombang iptek ‘*The Third Wave Society*’ (Toffler:1980), untuk menghadapi hal tersebut dalam dunia pendidikan di sekolah diperlukan suatu model pembelajaran yang sarat akan muatan nilai. Dengan harapan bahwa sistem kehidupan manusia akan tetap bermakna pada ‘lima sistem nilai’ (meminjam istilah Talcott Parson), yaitu: sistem nilai, sistem budaya, sistem sosial, sistem

personal dan sistem organik, maka pembelajaran PKn berupaya membangun suatu alternatif model pembelajaran yang berbasis nilai dalam kerangka mempersiapkan peserta didik memiliki karakteristik 'Manusia Indonesia Seutuhnya' yang siap menghadapi tantangan dan tuntutan era globalisasi.

Pada kenyataannya dalam pembelajaran PKn senantiasa mengalami suatu dilema. Pilihan antara memenuhi tuntutan kebutuhan untuk mengantisipasi perubahan sosial di masyarakat siap tantangan dan tuntutan era globalisasi, atau memenuhi tuntutan kebutuhan sebagai pengetahuan akademik dan pendidikan yang dapat memenuhi tatanan nilai, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta menjadi 'manusia Indonesia seutuhnya'. Hal ini ditemukan dalam perubahan kurikulum uji coba tahun 2004.

Dalam perspektif demikian, menjadi penting untuk melakukan analisis perubahan kurikulum melalui implementasi kurikulum uji coba tahun 2004 di SMP dalam konteks kerangka materi pendidikan berbasis nilai pada mata pelajaran PKn berkenaan dengan dasar pertimbangan upaya internalisasi-personalisasi pendidikan berbasis nilai namun siap menghadapi tantangan dan tuntutan globalisasi. Sehingga melalui penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut: "Dalam implementasi kurikulum uji coba tahun 2004, Pembelajaran PKn Berbasis Nilai bagaimana yang dapat dibangun, dipersonalisasi, diinternalisasi dan memenuhi tuntutan pembelajaran PKn yang bermuatan nilai dalam kerangka mempersiapkan peserta didik yang memiliki karakteristik 'Manusia Indonesia Seutuhnya' untuk menghadapi tantangan era globalisasi??"

Rumusan masalah ini merupakan penelitian yang berjudul: **“Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai di Sekolah Menengah Pertama”** (Kajian Deskriptif Naturalistik tentang Implementasi Kurikulum Uji Coba Tahun 2004 Pada SMP di Kabupaten Purwakarta).

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas maka terdapat beberapa pertanyaan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan filosofi pendidikan apa yang mendasari materi pembelajaran mata pelajaran PKn di SMP pada implementasi kurikulum uji coba tahun 2004 ?
2. Substansi esensi materi apa yang dapat dibangun pada pembelajaran mata pelajaran PKn berbasis nilai di SMP pada implementasi kurikulum uji coba tahun 2004?
3. Pendekatan pembelajaran apa yang tepat digunakan pada pembelajaran mata pelajaran PKn berbasis nilai di SMP pada implementasi kurikulum uji coba tahun 2004, sehingga dapat memenuhi tuntutan kebutuhan belajar peserta didik dan siap menghadapi kehidupan di masa depan?
4. Bagaimana merencanakan suatu model pembelajaran PKn Berbasis Nilai dalam mata pelajaran PKn di SMP yang dapat memenuhi kriteria: secara **filosofis pedagogis-relevan** dengan kebutuhan belajar peserta didik, secara **substansial akademis**-memenuhi tuntutan perkembangan keilmuan dan dinamika kemasyarakatan kini dan masa yang akan datang, dan secara **program pendidikan** mudah diaplikasikan dalam proses pembelajaran?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah model pembelajaran yaitu Pembelajaran PKn Berbasis Nilai di SMP sebagai implementasi kurikulum 2004 yang diujicobakan, dengan harapan dapat menjadi sebuah model alternatif program Pendidikan Umum/Pendidikan Nilai dalam membentuk suatu kepribadian utuh, mantap, matang dan produktif bagi peserta didik di SMP.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:

1. Pertimbangan filosofi pendidikan yang mendasari materi pembelajaran mata pelajaran PKn di SMP pada implementasi kurikulum uji coba tahun 2004.
2. Substansi esensi materi yang dapat dibangun pada pembelajaran mata pelajaran PKn berbasis nilai di SMP pada implementasi kurikulum uji coba tahun 2004.
3. Pendekatan pembelajaran yang tepat digunakan pada pembelajaran mata pelajaran PKn berbasis nilai di SMP pada implementasi kurikulum uji coba tahun 2004, sehingga dapat memenuhi tuntutan kebutuhan belajar peserta didik dan siap menghadapi kehidupan di masa depan.
4. Merekayasa suatu model pembelajaran PKn berbasis nilai di SMP yang dapat memenuhi kriteria: secara **filosofis pedagogis**-relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik, secara **substansial akademis**-memenuhi tuntutan perkembangan keilmuan dan dinamika kemasyarakatan kini dan

masa yang akan datang, dan secara **program pendidikan** mudah diaplikasikan dalam proses pembelajaran?

E. Manfaat Penelitian

Analisis rekayasa konstruk model pembelajaran PKn berbasis nilai di SMP sebagai implementasi kurikulum uji coba tahun 2004 yang dibangun sebagai hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran akademik terutama dalam rangka membangun Pembelajaran PKn yang berbasis nilai, merupakan upaya menginternalisasi dan mempersonalisasi 'kebermaknaan' tatanan nilai sebagai landasan sikap dan perilaku bagi peserta didik dalam kerangka proses penerapan Pendidikan Nilai di sekolah khususnya jenjang pendidikan dasar tingkat SMP melalui pembelajaran PKn, sebagai suatu program pendidikan yang fungsional.

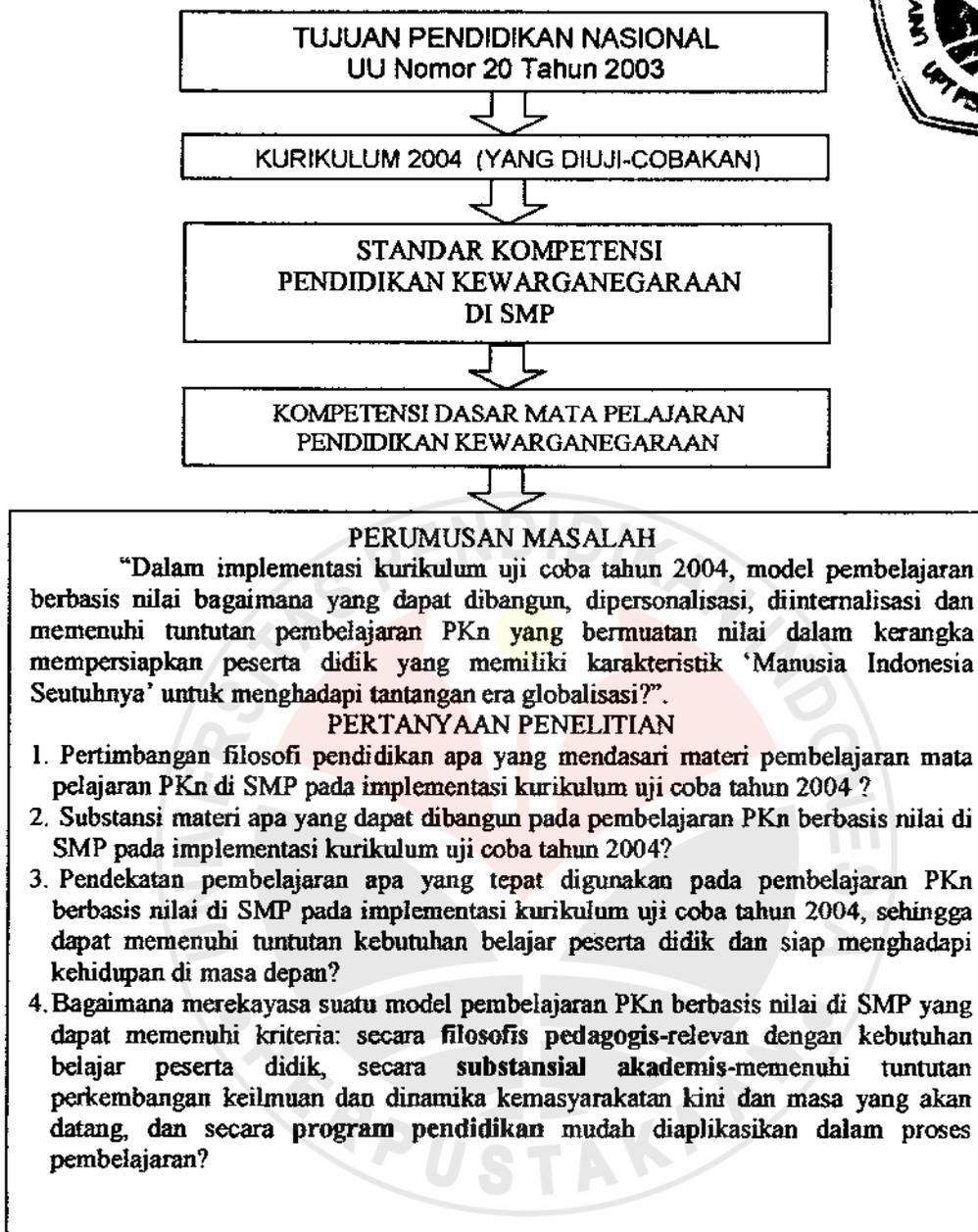
Pembelajaran PKn Berbasis Nilai di SMP diharapkan pula dapat menjadi pola atau cara yang logis, sistematis dan mudah diaplikasikan dalam praksis pembelajaran atau PBM bagi guru.

Pembelajaran PKn Berbasis Nilai merupakan model yang dibangun sebagai temuan penelitian ini dapat membantu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran PKn dan menjadi strategi model pembelajaran bagi mata pelajaran lain di SMP yang dapat melibatkan peserta didik dalam suasana kehidupan nyata, serta melatih peserta didik dalam proses pengambilan keputusan terhadap masalah kehidupan sosialnya secara bermakna berlandaskan tatanan nilai yang diyakininya.

Konstruksi model yang dibangun sebagai hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif pilihan dalam rangka pengambilan keputusan terutama berkaitan dengan pembelajaran berbasis nilai dalam praksis pembelajaran PKn pada SMP secara tepat dan relevan dengan kebutuhan belajar peserta didik sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pembelajaran PKn di SMP yang berlandaskan pada Pendidikan Nilai.

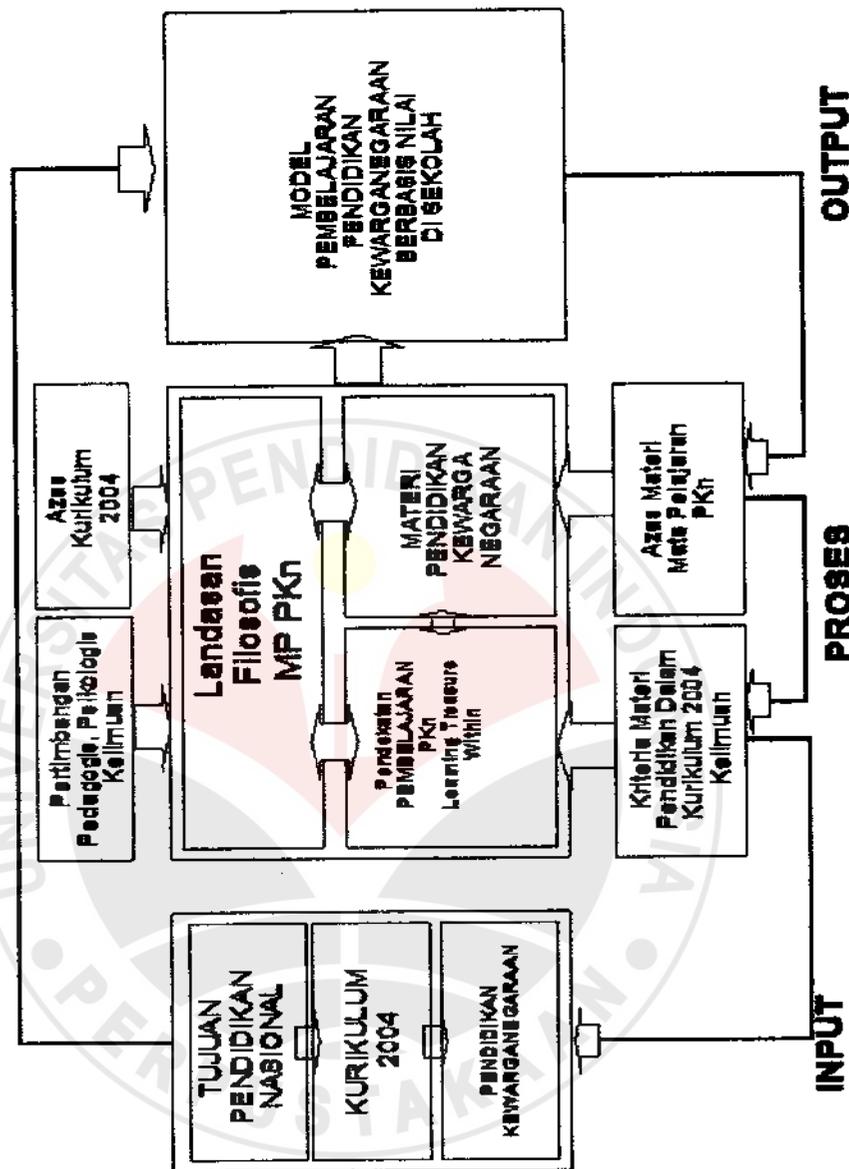
F. Paradigma dan Model Penelitian

Kuhn (1970) mengartikan paradigma sebagai “ *a set of ideas, assumptions, concepts and relationships which helps the scientist focus or direct his or her attention toward the subject matter being studied* “. Paradigma penelitian menjadi penuntun bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian, sedangkan model penelitian menjadi acuan dasar didalam kegiatan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan kajian teoretis, asumsi, dan proposisi yang dikemukakan, maka paradigma penelitian ini tergambar sebagai berikut:



(1) Bagan 1.1: Alur Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian;

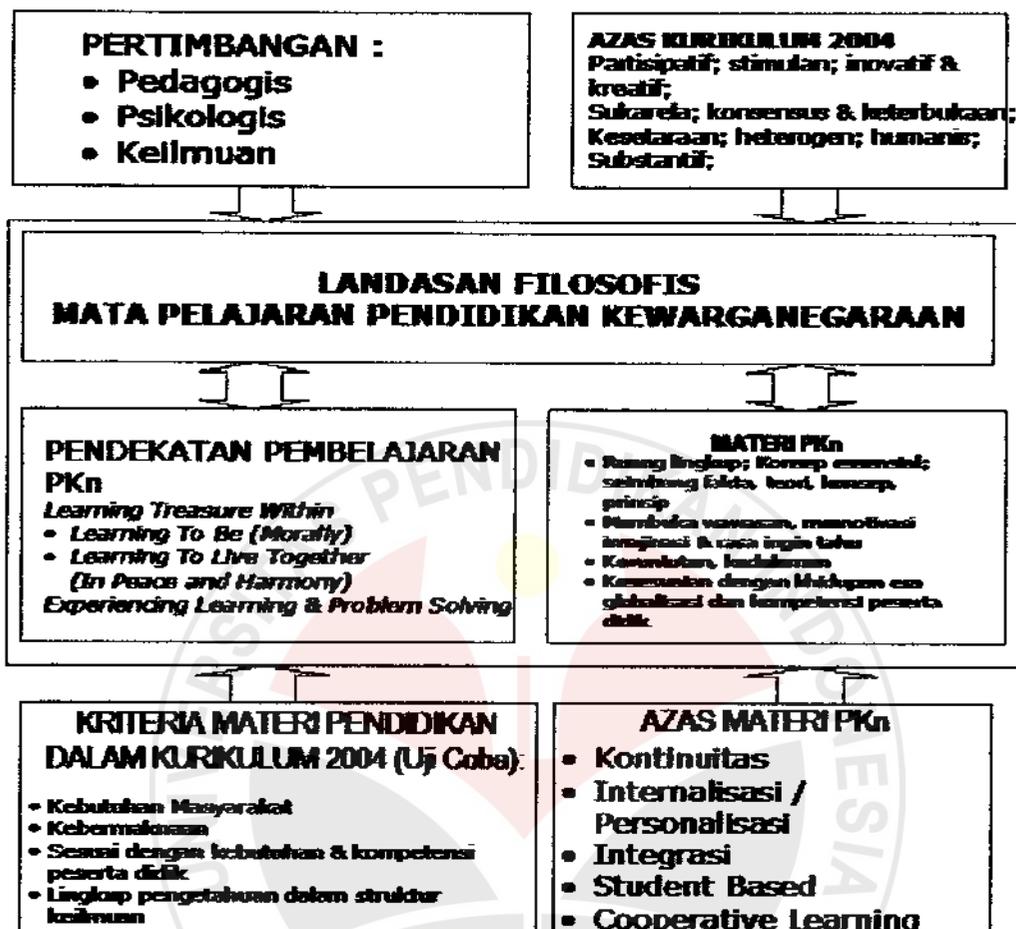
**PARADIGMA PENELITIAN
PEMBELAJARAN PKn BERBASIS NILAI DI SEKOLAH**



Bagan 1.2 Paradigma Penelitian

(2) Bagan 1.2: Paradigma Penelitian Pembelajaran PKn Berbasis Nilai di Sekolah Menengah Pertama

PROSES PARADIGMA PENELITIAN

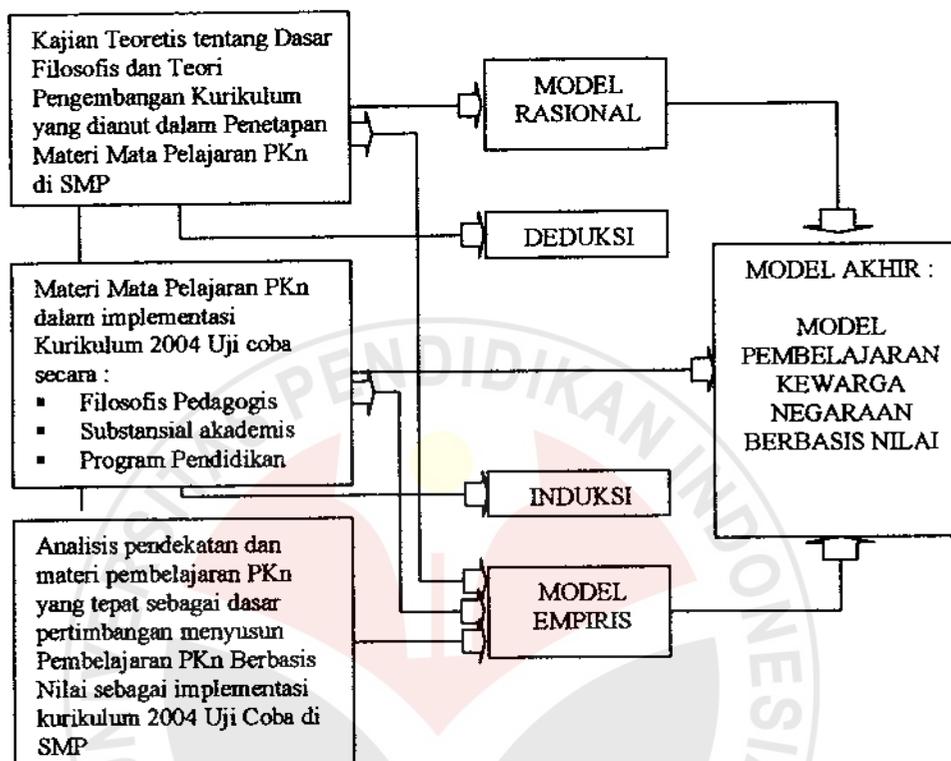


(3) Bagan 1.3: Paradigma Penelitian dalam Proses Pembelajaran PKn Berbasis Nilai

penyusunan model sebaiknya dilakukan pembatasan-pembatasan dan diajukan asumsi-asumsi tertentu secara eksplisit. (Amirin, 1992:78; Suriasumantri, 1992:11). Dalam pandangan Horton (1972:182) sebuah model adalah pencerminan atau abstraksi dari sebuah objek, proses, peristiwa, situasi atau sistem. Secara lebih luas, sebuah model adalah sesuatu yang mengungkap dan menjelaskan tentang hubungan dari berbagai komponen, aksi dan reaksi, serta sebab akibat.

Dalam membangun model, digunakan kombinasi berfikir secara deduktif dan induktif. Model yang dibentuk berdasarkan kerangka berfikir deduktif dengan mendasarkan pada pengetahuan teoretis yang relevan disebut dengan model rasional. Sedangkan model yang dibentuk berdasarkan kerangka berfikir induktif dengan mendasarkan pada pengumpulan data dari objek yang dikaji disebut dengan model empiris. Proses mengkombinasikan kedua model ini dalam rangka mencari model yang mendekati kenyataan dengan melakukan pengujian terhadap model rasional dengan kenyataan empiris, serta mencari logika ilmiah dari model empiris dengan mendasarkan pada model rasional.

PROSES HIPOTETIS PEMBELAJARAN PKn BERBASIS NILAI DI SMP



(5) Bagan 1.3: Proses Membangun Model Pembelajaran PKn Berbasis Nilai Di SMP.

Dalam konteks penelitian ini, proses mengkonstruksi model alternatif didasarkan pada analisis terhadap pembelajaran PKn berbasis nilai di SMP secara empiris, serta arah pembelajaran PKn berbasis nilai melalui proses kegiatan belajar mengajar di SMP secara hipotetis.

Model yang dibangun dalam penelitian ini secara fungsional termasuk model deskriptif, yang berupaya memaparkan objek tentang pembelajaran berbasis nilai dalam praksis pembelajaran PKn di SMP yang akan tergambar dalam matrik, gambar, bagan serta pemaparan verbal. Dalam fungsi sebagai

model – ‘Model Pembelajaran’, akan dikemukakan arah pembelajaran berbasis nilai dalam praksis pembelajaran PKn pada SMP dengan menggunakan pola pembelajaran KBM (KGM-KSB) secara selektif dalam arti alternatif pilihan model pembelajaran untuk pemecahan masalah tentang pendidikan berbasis nilai dalam implementasi kurikulum uji coba tahun 2004 pada materi mata pelajaran PKn pada SMP.

G. Asumsi yang melandasi penelitian

1. Pengembangan sebuah model pembelajaran yang sarat akan nilai melalui PKn, diperlukan dalam rangka pengayaan dan pemaknaan nilai pada diri peserta didik secara sistematis dan sistemik, sehingga menjadi wahana proses internalisasi dan personalisasi ‘kebermaknaan’ nilai-nilai landasan kegiatan dasar manusia yang didasari pertimbangan filosofi Pancasila dan filosofi pendidikan rekonstruksionisme, dan pertimbangan pedagogik-psikologis.
2. Pendidikan nilai melalui PKn memerlukan kemampuan berfikir tingkat tinggi dengan mengandalkan potensi akal dalam memaknai dan mempertimbangkan tatanan nilai, dimana pendidikan nilai dapat dibelajarkan dengan model pembelajaran yang tepat, yaitu ‘*experiencing learning*’ atau ‘*problem solving*’ – *conflict internal* yang dilakukan secara kontinyu, sehingga peserta didik memiliki kepercayaan diri dalam mengambil dan membuat suatu keputusan secara bernilai.
3. Proses pembelajaran berbasis nilai tepat dibelajarkan pada peserta didik SMP sebagai langkah awal pemahaman memaknai inti kegiatan dasar

manusia yang bernilai, pada akhirnya dapat menghasilkan peserta didik menjadi insan yang ber-akhlaqul karimah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yang bangga dan cinta tanah air, siap menghadapi tantangan abad 21.

4. Materi pembelajaran PKn berbasis nilai merupakan kerangka esensial pembinaan suatu kepribadian dalam rangka membentuk manusia yang memiliki jati diri rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta 'Manusia Indonesia Seutuhnya', yang memiliki *akhlaqul karimah*, ber-budi pekerti luhur, *A Good Citizenship*, dan makna nilai agama dan budaya yang melandasi nilai kegiatan dasar manusia dalam menghadapi tantangan era globalisasi.
5. Pertimbangan filosofi Pancasila dan filosofi pendidikan '*Rekonstruksionisme*' sebagai landasan filsafat pendidikan dalam pendidikan nilai pada mata pelajaran PKn dengan mendasarkan pada konstruk masa depan pendidikan, bagaimana pendidikan dibangun guna masa depan sehingga tepat dalam merekonstruksi Pembelajaran PKn Berbasis Nilai di SMP melalui proses KBM.
6. Guru sebagai pendidik yang memiliki peran utama sebagai pencipta iklim belajar yang berkaitan dengan kompetensi guru secara profesional, dalam memotivasi dan mengoptimalkan potensi peserta didik yang bernilai melalui '*the art of teaching*' seni mengajar dalam mengolah '*Authority of method*' metode pedagogik yang dikuasainya, sehingga proses



pembelajaran menjadi kelas laboratorium demokrasi belajar bernilai bermilai.

7. Rancangan pembelajaran yang baik disusun dan dipersiapkan sedini mungkin oleh guru, guna PBM (KGM-KSB) materi mata pelajaran PKn dapat mempersonalisasikan basis nilai kegiatan dasar manusia dalam pembelajaran di sekolah sebagai implementasi Kurikulum uji coba tahun 2004 dan merupakan langkah utama penerapan materi esensial berbasis nilai sebagai ini atau hakekat PKn yang disesuaikan dengan kepentingan pedagogis-psikologis pada SMP.

H. Definisi Operasional

Pada penelitian ini, definisi operasional dimaknai sebagai salah satu langkah untuk menjelaskan posisi penelitian dalam bentuk aspek terfokus dengan indikator yang dapat dilihat secara jelas dalam penelitian ini.

1. Model Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai

Pendidikan Nilai dimaknai sebagai : (a) penanaman, pengembangan dan pembinaan nilai-nilai pada diri seseorang; (b) bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta penempatannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya; (c) pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar memahami nilai kebenaran, kebaikan, dan keindahan, melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten.

Dalam konteks pendekatan sistem, pembentukan model merupakan aspek penting dalam rangka memudahkan analisis secara komprehensif, sistematis dan sistemik terhadap suatu masalah.

Model adalah suatu pencerminan, penggambaran sistem yang nyata atau abstraksi dari dunia nyata yang disederhanakan sehingga hanya parameter-parameter penting saja yang muncul dalam bentuknya dan mendeskripsikan hubungan antar parameter baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Dalam penyusunan model sebaiknya dilakukan pembatasan-pembatasan dan diajukan asumsi-asumsi tertentu secara eksplisit. (Amirin, 1992:78; Suriasumantri, 1992:11). Dalam pandangan Horton (1972:182) sebuah model adalah pencerminan atau abstraksi dari sebuah objek, proses, peristiwa, situasi atau sistem. Secara lebih luas, sebuah model adalah sesuatu yang mengungkap dan menjelaskan tentang hubungan dari berbagai komponen, aksi dan reaksi, serta sebab akibat.

Pembelajaran PKn Berbasis Nilai di SMP dimaknai sebagai **model pembelajaran yang berdimensi nilai agama dan budaya melandasi nilai-nilai, yakni 1) Nilai Kemanusiaan 'humanisme', 2) Nilai Politik yakni nilai kebangsaan/nasionalisme dan nilai musyawarah/demokrasi, 3) Nilai IPTEK, 4) Nilai Seni, 5) Nilai Ekonomi dan 6) Nilai Kesehatan, moral dan norma, yang menjadikan seseorang mampu memperjelas dan menentukan sikap terhadap substansi nilai dan norma dalam sistem dinamika kehidupan beriman dan berbudaya, serta pembentukan jati diri, warga negara yang bertanggung jawab dan menjadi totalitas suatu bangsa yang memiliki rasa kebangsaan, cinta tanah air sebagai 'Manusia Indonesia Seutuhnya'.**

Pembelajaran PKn Berbasis Nilai di SMP dimaknai pula sebagai suatu model pembelajaran yang ditujukan: (a) pembinaan kepribadian utuh, mantap,

matang dan produktif pada diri peserta didik dengan basis nilai sebagai fondasi esensial bagi kehidupan; (b) mengklarifikasi tatanan normatif nilai moral dan norma; (c) menerapkan pembentukan nilai kepada peserta didik; (d) menghasilkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai yang diinginkan; (e) membimbing perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai tersebut.

Tujuan Pembelajaran PKn Berbasis Nilai adalah model pembelajaran yang meliputi tindakan mendidik yang berlangsung mulai dari usaha penyadaran (internalisasi-personalisasi) nilai berdasarkan landasan fundamental nilai agama dan budaya yang melandasi kegiatan dasar manusia '*Basic human activities*', yakni: 1) nilai kemanusiaan (hubungan humanisme), 2) nilai IPTEK, 3) nilai politik (kebangsaan/nasionalisme; musyawarah/demokrasi), 4) nilai seni, 5) nilai ekonomi dan 6) nilai kesehatan, sampai pada perwujudan perilaku-perilaku yang bernilai, serta memiliki kepribadian utuh dengan mental '*character and national building*' rasa kebangsaan dan cinta akan tanah air.

Nilai yang dimaksud dalam konstruk model pembelajaran berbasis nilai adalah (a) keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya; (b) patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif; (c) konsepsi (tersirat atau tersurat, yang sifatnya membedakan individu atau ciri-ciri kelompok) dari apa yang diinginkan, yang mempengaruhi pilihan terhadap cara, tujuan antara dan tujuan akhir tindakan, (d) nilai rasa kebangsaan dan cinta tanah air '*character and national Building*'.

Basis nilai agama dan budaya (dinamika sistem nilai) yang mendasari kegiatan dasar manusia '*basic human activities*' didasarkan dan dimaknai sebagai berikut:

- a. Nilai Kemanusiaan, sebagai landasan nilai hubungan antar manusia, memaknai dasar kehidupan manusia di seluruh dunia ini sama-sama merupakan makhluk Tuhan, Nilai kemanusiaan merupakan dasar universalisme dan humanisme, yaitu hubungan antar manusia secara keseluruhan, menjunjung tinggi sistem hubungan antar manusia di muka bumi. Dasar ini membuang segala perasaan lebih tinggi dari manusia lain, tetapi mengutamakan sikap dan tindakan bahwa manusia sama tinggi dan sama rendahnya di hadapan Tuhan YME.
- b. Nilai IPTEK, berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 pasal 3, "...menuju peserta didik yang ber-budi pekerti dan memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Nilai IPTEK melandasi cara berpikir manusia secara kritis dalam mengambil suatu keputusan, bersikap dan berperilaku, sehingga dengan nilai ini manusia sadar bahwa memiliki IPTEK akan mempermudah semua kegiatan hidup manusia di atas muka bumi ini.
- c. Nilai Politik, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai politik melandasi karakter kepribadian manusia sebagai warga negara Indonesia yang memiliki nilai-nilai yakni: 1) nilai Kebangsaan (nasionalisme), yaitu memaknai nilai 'Kewarganegaraan' sebagai proses pendidikan politik yang bersandar pada hikmah 'Sumpah Pemuda' yaitu 'Persatuan dan Kesatuan' dalam Satu Nusa, Satu Bangsa dan Satu Bahasa, menuju menjadi

warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis dan bertanggung jawab; 2) nilai Musyawarah (demokrasi), yaitu pemahaman tentang dasar pembentukan pemerintahan dan masyarakat yang di dalamnya kekuasaan memerintah atau mengatur dipegang secara sah, tidak hanya oleh satu atau beberapa golongan saja, melainkan oleh segala anggota masyarakat, ajaran agama Islam pun memerintahkan dilakukannya musyawarah. Konsep musyawarah ini dilakukan oleh seluruh rakyat melalui perwakilan yang diatur dalam aturan kenegaraan. Atas dasar kerakyatan dibentuk DPR dan MPR, sehingga NKRI sungguh-sungguh dapat mewujudkan bentuk demokrasi yang baik dan benar.

- d. Nilai Seni, rasa estetika-imajinasi-kreatifitas yang menyebabkan seseorang menjadi seorang inovator bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
- e. Nilai Ekonomi, berlandaskan pada kegunaan '*useful*' suatu benda yang menjadi sarana kegiatan manusia.
- f. Nilai Kesehatan, fisik yang sehat serta mental yang sehat akan mempermudah kehidupan manusia, sehingga dapat bekerja, berpikir dan melakukan sesuatu dengan baik.

2. Pendekatan Pembelajaran dalam KBM (KGM-KSB)

Pendekatan pembelajaran yang dimaksud dimaknai sebagai cara-cara, metode dalam proses belajar mengajar dengan serangkaian kegiatan pembelajaran yang diperoleh di dalam maupun di luar kelas dengan tujuan kearah pembekalan sejumlah konsep/norma dan pelakonan sejumlah pengalaman belajar atau kehidupan serta pelatihan seperangkat kemahiran dan keterampilan, baik

keterampilan belajar, keterampilan teknis maupun keterampilan hidup *'life skill'* kecakapan hidup serta memiliki *character and national building* (meminjam istilah Soekarno), dengan KBS multi metode-media & sumber, kelompok belajar berkelompok dengan pola pemecahan masalah, menemukan sendiri berdasarkan pengalamannya dengan sistem partisipatorik/proyek study/magang. (Djahiri, 2000).

Pendekatan pembelajaran dalam KBM mata pelajaran PKn dalam penelitian ini dimaknai sebagai cara-cara dalam proses dan upaya membelajarkan dengan menggunakan pendekatan belajar kontekstual yaitu untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga negara Indonesia. Pendekatan belajar kontekstual dapat diwujudkan antara lain dengan metode-metode; kooperatif, penemuan, inkuiri, interaktif, eksploratif, berpikir kritis dan pemecahan masalah.

3. Materi Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

Sekolah memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga negara melalui mata pelajaran PKn.

Materi mata pelajaran dimaknai sebagai bahan ajar yang berisi; isi pesan, ruang lingkup, kedalaman dan keruntutan struktur materi yang akan dan harus di berikan pada peserta didik sesuai dengan isi kurikulum uji coba tahun 2004.

Materi mata pelajaran PKn dimaknai untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan sebagai berikut :

a) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan; b) Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; c) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; d) Berintegrasi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (Depdiknas, 2003).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 dalam penjelasan pasal 37 ayat (1) menjelaskan bahwa PKn dimaksudkan untuk memberikan peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (penulis).

4. Implementasi Kurikulum 2004 (Uji Coba)

Kurikulum 2004 (uji coba) yang didalamnya adalah kurikulum berbasis kompetensi, merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah.

Kurikulum berbasis kompetensi berorientasi pada: (1) hasil dan implikasi yang diharapkan muncul pada diri peserta didik melalui serangkaian pengalaman belajar dan (2) keberagaman yang dapat diwujudkan sesuai dengan kebutuhannya. Rumusan kompetensi dalam KBK merupakan pernyataan apa yang diharapkan dapat diketahui, disikapi, atau dilakukan siswa dalam setiap tingkatan kelas dan

satuan pendidikan dan sekaligus menggambarkan kemajuan siswa yang dicapai secara bertahap dan berkelanjutan untuk menjadi kompeten.

5. Sekolah Menengah Pertama

Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 mengenai konsep SMP dimaknai :

(a) Pasal 1 ayat (8): **Jenjang pendidikan** adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan; (b) Pasal 14: **jenjang pendidikan formal** terdiri atas **pendidikan dasar**, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; (c) Pasal 17 ayat (1): Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah; (d) Pasal 17 ayat (2): Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.

Peserta didik pada SMP membutuhkan materi PKn bernuansa nilai dan tepat menjadi wahana pendidikan nilai pada masa usia 11-15 tahun atau pada tahap SMP, sehubungan pada masa ini ditinjau dari perkembangan kepribadian merupakan masa transisi-masa mencari jati diri, apabila tidak diberikan pemahaman materi PKn dengan pemilihan nilai yang tepat yang akan digunakan, maka ia cenderung akan mencari pemecahan masalah kehidupan ke arah yang kurang tepat, peserta didik SMP adalah individu yang sedang berada dalam proses perkembangan seperti perkembangan fisik/jasmani, intelektual, sosial, emosional, nilai-moral-etika, dan sebagainya. Perkembangan-perkembangan yang dialami oleh peserta didik umumnya diperoleh melalui proses belajar.

Sekolah Menengah Pertama adalah jenjang pendidikan dasar, fungsi memberikan dasar-dasar bagi perkembangan selanjutnya dan dasar-dasar nilai yang kuat masih harus dominan. Proporsi pendidikan nilai pada usia peserta didik

SMP harus lebih besar dibandingkan Sekolah Dasar, sebab peserta didik usia SMP sudah lebih tinggi kesadaran dan kemampuannya dalam pemecahan masalah sosial, di samping kemampuan bekerjasamanya juga telah lebih tinggi.

6. Materi Pendidikan Kewarganegaraan

Dimaknai sebagai suatu proses yang dilakukan oleh pengembang kurikulum di dalam langkah pemilihan secara tepatguna, dan langkah pengkondisian dari suatu konsep, proporsi, teori sebagai pengetahuan menjadi materi pendidikan yang bermakna dalam proses pembelajaran pada satu mata pelajaran di sekolah.

Materi pendidikan yang dimaksud adalah materi pendidikan secara umum yang termuat dalam kurikulum yang mencakup tiga komponen, yakni; suatu ilmu pengetahuan (berupa fakta, keterangan, prinsip-prinsip, definisi), keterampilan dan proses (seperti membaca, menulis, berhitung, berfikir kritis, berkomunikasi lisan dan tulisan) dan nilai-nilai (Hymen, 1973:4), dan secara khusus dalam kurikulum 2004 (uji coba) tiga komponen materi PKn adalah; kecerdasan warga negara, keterampilan warga negara dan karakter warga negara (Puskur,2002), serta membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, yang memiliki tujuan akhir yaitu 'Manusia Indonesia Seutuhnya'.

7. Tuntutan Teoretis dan Tantangan Masa Depan Pembelajaran Pendidikan Nilai dalam Materi PKn

Dimaknai sebagai suatu kondisi dan suasana proses kegiatan belajar peserta didik pada mata pelajaran PKn dengan pembelajaran berbasis nilai pada SMP, yang dapat mengakomodasikan kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan kaidah dan acuan dalam teori pembelajaran, serta sesuai dengan

perkembangan kehidupan sosial era globalisasi yang terjadi di lingkungan belajar peserta didik tersebut dengan pembekalan suatu kepribadian yang bernilai, sehingga peserta didik dapat membuat pilihan atau menentukan suatu keputusan secara bernilai. Tuntutan teoretis dalam konteks penelitian ini akan dilihat dari karakteristik, ciri, pendekatan dari teori pembelajaran, sedangkan tantangan masa depan pembelajaran PKn akan dilihat dari aspek kesesuaian proses pembelajaran yang dilakukan dengan lingkungan belajar, yakni; **sejumlah landasan nilai yang mendasari kegiatan dasar manusia melalui perkembangan ilmu Kewarganegaraan, perkembangan sosial budaya dan ciri perkembangan psikologis peserta didik pada SMP.** Pendidikan nilai dalam materi PKn yang dibutuhkan peserta didik dalam menghadapi tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tantangan masa depan di tengah krisis multi dimensi (serba pilihan)-erosi Nilai Moral Norma dan '*dehumanisasi*' sikap perilaku manusia.

8. Pertimbangan Filosofi Pendidikan

Dimaknai sebagai suatu langkah berfikir, bersikap dalam kegiatan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pengembang kurikulum di dalam proses seleksi dan penetapan materi dalam membangun model pembelajaran dalam PKn di SMP, yang didasarkan pada pemikiran secara menyeluruh, mendalam, sistematis dan logis dalam perspektif bagaimana seharusnya serta mendasarkan pada pandangan teori pendidikan yang dikenal berkaitan dengan penyusunan lingkup materi pendidikan dalam kurikulum 2004 (uji coba) dan sekuensi materi pendidikan berdasarkan urutan tingkat kebutuhan.



Pertimbangan filosofi pendidikan dalam konteks penelitian ini akan dilihat dari aspek karakteristik, ciri, fungsi dan tujuan dari filsafat pendidikan.

9. Tuntutan Kebutuhan Belajar Peserta Didik

Dalam konteks penelitian ini, tuntutan kebutuhan belajar peserta didik merupakan harapan yang dapat dihasilkan dari suatu proses pembelajaran berbasis nilai dalam PKn di sekolah dalam wujud perolehan kemampuan dasar ber-PKn melalui tatanan basis nilai yang mendasari kegiatan dasar manusia dan keterampilan dari peserta didik sebagai suatu pengalaman belajar dalam keseluruhan rentang kehidupan ke-warganegara-annya secara nyata disertai personalisasi dan internalisasi nilai-nilai (nilai agama dan budaya yang memayungi kegiatan dasar manusia yakni: nilai kemanusiaan '*hubungan humanisme*', nilai IPTEK, nilai politik (kebangsaan/nasionalisme, musyawarah/demokrasi, nilai seni, nilai ekonomi dan nilai kesehatan). Aspek yang dilihat dalam penelitian ini merupakan kategori kualitatif, yakni; peserta didik memiliki kompetensi dasar dalam pengetahuan yang memadai terutama tentang 'nilai-nilai', memiliki sikap yang pasti terhadap sesuatu, dan memiliki kemampuan dasar dalam mengambil keputusan terhadap masalah yang dihadapinya, serta pemahaman akan tanggung jawab, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.